



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG
PANGAN**

**DENGAN RAHMAT
TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi harkat asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional ;
- b. Bahwa pangan yang aman, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ;
- c. Bahwa pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional ;

**ACT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA
NUMBER 7 OF 1996 ON
FOOD**

**BY THE GRACE OF
GOD ALMIGHTY**

**THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA,**

Considering :

- a. That food constitutes a basic human need, of which the fulfillment is a fundamental right of each Indonesian people, in the realization of quality human resources to carry out the national development ;
- b. That sufficient availability of safe, nutritious and quality food is a main pre-requisite, which must be met in the effort to arrange a system which provides protection for the purpose of health and to play a larger role in increasing the prosperity and welfare of the people ;
- c. That food as trade commodity requires the support of an honest and responsible food trading system so that food would be available which is within reach of the purchasing power of the community and to participate in the role to increase the national economic growth ;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>d. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a, butir b dan butir c, serta untuk mewujudkan sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang pangan, maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pangan ;</p> <p>Mengingat :</p> <p>Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945</p> <p>Dengan Persetujuan</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan :</p> <p>UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN</p>	<p>d. They in connection with the considerations in points a, b, and c, and in order to realize an effective arrangement, promotion and supervision system in the field of food, it is necessary to establish and Act on Food ;</p> <p>Bearing in :</p> <p>Article 5 paragraph (1), article 20 paragraph (1), article 27 paragraph (2) and article 33 of the 1945 Constitution ;</p> <p>With the Approval of the</p> <p>HOUSE OF PEOPLE'S REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>HAS DECIDED :</p> <p>To stipulate</p> <p>ACT ON FOODSTUFF</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik</p>	<p>CHAPTER 1</p> <p>GENERAL PROVISIONS</p> <p>Article 1</p> <p>In this Act referred to as :</p> <p>1. food shall be everything originating from biological sources and water,</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman ;</p> <p>2. pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bantuan tambahan ;</p> <p>3. sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia ;</p> <p>4. keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia ;</p> <p>5. produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan ;</p> <p>6. pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan ;</p>	<p>whether processed or not, which is designated as foodstuffs and beverages for human consumption, including food additive material, food raw material and other materials used in the process of preparation, processing and or the making of foodstuffs or beverages ;</p> <p>2. processed foodstuff is foodstuffs or beverages, the result of a process in a certain manner or method, without food additives ;</p> <p>3. food system is everything which is related to the regulation, development and or supervision on food production activities or process and food circulation until ready for human consumption ;</p> <p>4. food safety is the condition and efforts required to prevent food from possible biological, chemical-contamination and contamination by other objects which may disturb, harm, and endanger the human health ;</p> <p>5. food production is an activity or process of producing, preparing, processing, making, preserving, packing or repackaging and or changing the form of food ;</p> <p>6. food transportation shall be any activity or a series of activities in the framework of transferring food from one place to another by whatever way or means of transportation in the framework of the production, circulation and or trade of food ;</p>
--	--



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>7. peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak ;</p> <p>8. perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan ;</p> <p>9. sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia ;</p> <p>10. kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak ;</p> <p>11. iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen ;</p> <p>12. rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis</p>	<p>7. circulation of food is any activity or series of activities, in the framework of distributing / food to the community, whether to be traded or not ;</p> <p>8. trade of food is any activity or series of activities, in the framework of the sale and or purchase of food including the offer to sell food, and other activities in connection with the transfer or body by obtaining a remuneration ;</p> <p>9. food sanitation is the efforts to prevent the possibility for the growth and propagation of purifying and pathogenic microorganism in cattalos, beverages, equipment and building capable of spoiling food and endangering humans ;</p> <p>10. food packing is the material, used to contain and or pack food, whether directly touching the food a not ;</p> <p>11. food irradiation is the method of radiating food using a radioactive substance as well as accelerators to prevent purifying and decay and to free food from pathogenic microorganism ;</p> <p>12. food genetic engineering is the process involving the transfer of the genes (bearer of the characteristics) of one</p>
--	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul ;</p>	<p>biological kind to another which is different or similar to derive a new kind which is able to produce a more superior food product ;</p>
<p>13. mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman ;</p>	<p>13. food quality is the value determined based on the criteria of food safety, nutrition content and trade standard on foodstuffs, catables and beverages ;</p>
<p>14. gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia ;</p>	<p>14. food nutrients is a substance or compound found in food consisting of carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals as well as their derivatives which is useful for the growth and health of human ;</p>
<p>15. label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan ;</p>	<p>15. food label is any information concerning food in the form of a picture, writing a combination of both, or another form accompanying the food, which is put in, affixed to or constituting part of the food packing ;</p>
<p>16. iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilkaskan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan ;</p>	<p>16. food advertisement is any information or statement, concerning food in the form of a picture, a writing, or another form carried out by various methods for the marketing and or the trade of food ;</p>
<p>17. ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yagn tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau ;</p>	<p>17. food security is the condition in which the fulfillment of food for the households is reflected by the availability of sufficient food both its quantity and quality, safe, evenly distributed and within reach ;</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>18. setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia ;b. terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab ; danc. terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat . <p style="text-align: center;">B A B II</p> <p style="text-align: center;">KEAMANAN PANGAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Pertama Sanitasi Pangan</p>	<p>18. any person is an individual or business entity, whether in the form a legal entity or not .</p> <p style="text-align: center;">Article 2</p> <p>The food development is implemented to fulfill the basic demand of man, which provides a fair and equal benefit based on independence and not contradictory to the conviction of the community.</p> <p style="text-align: center;">Article 3</p> <p>The objectives of the regulation, development and supervision of food are :</p> <ol style="list-style-type: none">a. the availability of food, fulfill the requirements on safety, quality and nutrition for the interest of human health ;b. the creation of an honest and responsible food trade ; andc. the realization of a food sufficiency level in accordance with the need of the community . <p style="text-align: center;">CHAPTER II</p> <p style="text-align: center;">FOOD SAFETY</p> <p style="text-align: center;">First Part Food Sanitation</p>
--	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 4	Article 4
<p>(1) pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan ;</p> <p>(2) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dan ditetapkan serta diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.</p>	<p>(1) the government shall determine the sanitation requirements in the food production activities or process, storage, transportation and or circulation ;</p> <p>(2) the requirements as referred to in paragraph (1) constitute the minimum requirements which must be met and are determined and applied gradually with due observance of the readiness as well as the needs of the food system .</p>
<p>Pasal 5</p>	<p>Article 5</p>
<p>(1) sarana dan atau prasarana yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi ;</p> <p>(2) penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan serta penggunaan sarana dan prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan sanitasi .</p>	<p>(1) the facilities and or infrastructure which is used directly or indirectly in the food production activities or process, storage, transportation and or circulation must fulfill the sanitation requirements ;</p> <p>(2) the implementation of the food production activities or process, storage, transportation and or circulation and the use of the means and infrastructures, as referred to in paragraph (1) shall be conducted in accordance with the sanitation requirements .</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>Article 6</p>
<p>Setiap orang yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib :</p>	<p>Any person responsible in the executive of food production activities or process, storage, transportation and or circulation shall :</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>a. memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan dan atau keselamatan manusia ;</p> <p>b. menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala dan</p> <p>c. menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Orang perseorangan yang menangani secara langsung dan atau berada langsung dalam lingkungan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Setiap oranga dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Bagian Kedua Bahan Tambahan Pangan</p>	<p>a. meet the requirements on sanitation, security and or safety of humans ;</p> <p>b. execute a periodic sanitation monitoring program, and ;</p> <p>c. execute the supervision on the fulfillment of the sanitation requirements .</p> <p style="text-align: center;">Article 7</p> <p>Individual persons who are directly handling and or are directly within the environment of the food production activities or process, storage, transportation and or circulation must fulfill the sanitation requirements.</p> <p style="text-align: center;">Article 8</p> <p>Any person is prohibited from performing food production activities or process, storage, transportation and circulation in a condition, which does not meet the sanitation requirements.</p> <p style="text-align: center;">Article 9</p> <p>The provisions as referred to in Article 4, Article 5, Article 6 and Article 7, shall further be regulated with a Government Regulation.</p> <p>Second Part Food Additives</p>
--	--



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan ;</p> <p>(2) pemerintah menetapkan lebih lanjut bahan yang dilarang dan atau dapat digunakan sebagai bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Article 10</p> <p>(1) any person producing food to be circulated is prohibited from using whatever materials as food additives which are declared as prohibited or exceeding the maximum threshold limit which has been determined ;</p> <p>(2) The government shall further determine the materials, which are prohibited, and or which can be use as food additives in the food production activities or process, as well as the maximum threshold limit as referred to in paragraph (1).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Article 11</p> <p>The materials which will be used as food additive but of which the impact on human health is not yet known must first be examined as regards its safety and its in the production activities or process of food which is to be circulated shall be carried out after an approval has been obtained from the Government.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Article 12</p> <p>The provisions of the provisions referred to in article 10, article 11, shall be regulated further with a Government Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Rekayasa Genetika dan Iradiasi Pangan</p>	<p style="text-align: center;">Third Part Genetic Engineering and Food Irradiation</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 13	Article 13
<p>(1) setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan bagi kesehatan manusia sebelum diedarkan ;</p> <p>(2) Pemerintah menetapkan persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetika dalam kegiatan atau proses produksi pangan, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.</p>	<p>(1) Any person who produces food or uses raw material, food additives and or other auxiliary material in the production activity or process of food which is produced from genetic engineering, must first have the safety of the food for human health examined before being circulated.</p> <p>(2) The government shall establish the requirements and the principles of research, development and the use of genetic engineering method in the food production activity or process and lays down the requirements for the testing of food which is produced from the genetic engineering process.</p>
Pasal 14	Article 14
<p>(1) Iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan dilakukan berdasarkan izin Pemerintah ;</p> <p>(2) Proses perizinan penyelenggaraan kegiatan atau proses produksi pangan yang dilakukan dengan menggunakan teknik dan atau metode iradiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan kesehatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya bahan radioaktif untuk menjamin keamanan pangan, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.</p>	<p>(1) Irradiation in the food production activities and process shall be conducted based on a permit of the Government ;</p> <p>(2) The licensing process for the execution of the food production activities and or process by using irradiation techniques and or method as referred to in paragraph (1), must meet the requirements on health, waste handling and overcoming of the danger of radioactive material to guarantee the food security, work safety and environmental preservation.</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kemasan Pangan</p>	<p style="text-align: center;">Article 15</p> <p>The provisions as referred to in article 13 and article 14, shall be further determined with a Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;">Fourth Part Food Package</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;</p> <p>(2) Pengemasan pangan yang diedarkan dilakukan melalui tata cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran ;</p> <p>(3) Pemerintah menetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara peggemasan pangan tertentu yang diperdagangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 16</p> <p>(1) Any person producing food to be circulated is prohibited from using any material as food packing which is declared prohibited and or which may release contaminants which are harmful or endangering human health ;</p> <p>(2) The packing of circulated food shall be carried out according to a procedure which could prevent damage and or contamination ;</p> <p>(3) The government shall determine the materials which are prohibited to be used as the packing of food, and the procedures of packing certain food which will be sold.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Bahan yang akan digunakan sebagai kemasan pangan, tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan penggunaannya bagi pangan yang diedarkan dilakkan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Article 17</p> <p>The materials which will be used as food packing, but of which the impact on human health is not yet known, must first be examined as regards its safety, and its use for food which to be circulated shall be carried out after an approval has been obtained from the Government.</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan ;</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.</p>	<p style="text-align: center;">Article 18</p> <p>(1) Any person is prohibited from opening the final packing of food to repacked and traded ;</p> <p>(2) The provisions as referred to in paragraph (1) does not apply to food of which the procurement is in large quantities and is customarily repacked in small quantities for further sale.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Bagian Kelima Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium</p>	<p style="text-align: center;">Article 19</p> <p>The provisions referred to in article 16, article 17 and article 18, shall be further regulated with a Government Regulation.</p> <p>Fifth Part Food Quality Assurance and Laboratory Examination</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi ;</p> <p>(2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan tersebut terlebih dahulu diuji secara laboratoris sebelum peredarannya ;</p> <p>(3) Pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (2),</p>	<p style="text-align: center;">Article 20</p> <p>(1) Any person who produces food for trading must establish a quality warranty system, in line with the type of food produced ;</p> <p>(2) With regard to certain food sold, the Government may determine the requirements that said food be tested in the laboratory fists before circulation ;</p> <p>(3) The laboratory testing as referred to in paragraph (2), shall be carried out in a</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan atau telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah;</p> <p>(4) Sistem jaminan mutu serta persyaratan pengujian secara laboratoris, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dan diterapkan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan;</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pangan Tercemar</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Setiap orang dilarang mengedarkan :</p> <p>a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia ;</p> <p>b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan ;</p> <p>c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan ;</p> <p>d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau</p>	<p>laboratory which is appointed by and or which has obtained an accreditation from the Government ;</p> <p>(4) The quality assurance system and the laboratory testing requirements as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be determined and applied in stages, by paying attention to the readiness and the need of the food system ;</p> <p>(5) The provisions as referred to in paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) shall be further determined with a Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;">Sixth Part Contaminated Food</p> <p style="text-align: center;">Article 21</p> <p>Any person is prohibited from circulating :</p> <p>a. Food containing materials which are toxic, dangerous or which may harm or endanger the health or life of humans ;</p> <p>b. Food containing pollutants exceeding the determined maximum threshold limit ;</p> <p>c. Food containing materials prohibited to be used in the food production activities or process ;</p> <p>d. Food containing materials which are dirty, spoiled, putrid, decomposed or</p>
--	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia ;</p> <p>e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Untuk mengawasi dan mencegah tercemarnya pangan, Pemerintah :</p> <p>a. Menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan serta ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;</p> <p>b. Mengatur dan atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode dan atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang dapat memiliki risiko yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia ;</p> <p>c. Menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan atau penyajian pangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>containing infected vegetable or animal material, or originating from a carcass so that the food becomes not fit to be consumed by humans ;</p> <p>e. Food of which the time limit has expired.</p> <p style="text-align: center;">Article 22</p> <p>To supervise and prevent the contamination of food, the Government :</p> <p>a. Determines the materials prohibited to be used in the food production activities or process as well as the maximum threshold limit of pollutants allowed ;</p> <p>b. Regulates and or determines the requirements for using certain manners, methods and or materials in the food production activities or process, storage, transportation and or circulation which may have a risk which is harmful and or endangering humans health ;</p> <p>c. May determine the materials prohibited to be used in the production of food processing, preparing, marketing and or presentation equipment.</p> <p style="text-align: center;">Article 23</p> <p>The provisions referred to in article 21 and article 22, shall be further regulated with a Government Regulation.</p>
--	--



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB III	CHAPTER III
MUTU DAN GIZI PANGAN	FOOD QUALITY AND NUTRITION
Bagian Pertama Mutu Pangan	First Part Food Quality
Pasal 24	Article 24
(1) Pemerintah menetapkan standar mutu pangan ; (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat membelakakan dan mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;	(1) The government shall determine the quality standard of food ; (2) With regard to certain food traded, the Government may enforce and obligate the fulfillment of the food quality standard which is determined based on the provisions as referred to in paragraph (1) ;
Pasal 25	Article 25
(1) Pemerintah menetapkan persyaratan sertifikasi mutu pangan yang diperdagangkan ; (2) Persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.	(1) The government shall determine the requirements quality certification of food sold ; (2) The requirements on food quality certification as referred to in paragraph (1), shall be applied in phases, based on the types of food, by observing the readiness and needs of the food system.
Pasal 26	Article 26
Setiap orang dilarang memperdagangkan : a. Pangan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), apabila tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya ;	Any person is prohibited to trade in : a. Certain food, as referred to in article 24 paragraph (2), if it does not meet the quality standard determined in accordance with its designation ;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>b. Pangan yang mutu berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan ;</p> <p>c. Pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.</p>	<p>b. Food of which the quality is different or not the same as the food quality warranted ;</p> <p>c. Food which do not meet the food quality certification requirements as referred to in article 25.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Gizi Pangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p>	<p style="text-align: center;">Second Part Food Nutrition</p> <p style="text-align: center;">Article 27</p>
<p>(1) Pemerintah menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang gizi bagi perbaikan status gizi masyarakat ;</p> <p>(2) Untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangka, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan ;</p> <p>(3) Dalam hal terjadi kekurangan dan atau penurunan status gizi masyarakat, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan ;</p> <p>(4) Setiap orang yang memproduksi pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib memenuhi persyaratan tentang gizi yang ditetapkan.</p>	<p>(1) The government shall determine and implement a policy in the field of nutrition for the improvement of the nutrition status of the community ;</p> <p>(2) To increase the nutrition content of certain processed food sold, the Government may determine special requirements concerning the food composition ;</p> <p>(3) In case of shortage and or decrease in the nutrition status of the community, the Government may determine the requirements for the improvement or enrichment of the nutrition content of certain circulated food ;</p> <p>(4) Any person producing food as referred to in paragraph (2) and (3) must fulfill the requirements on nutrition which have been determined.</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan ;</p> <p>(2) Pangan olahan tertentu serta tata cara pengolahan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Article 28</p> <p>(1) Any person producing certain processed food to be sold, must carry out the food processing procedure which could hamper the process of decreasing or losing the nutrition content in the food raw materials used ;</p> <p>(2) Certain processed food and the food processing procedure as referred to in paragraph (1) will be further regulated by the Government.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Article 29</p> <p>The provisions as referred to in article 24, article 25, article 26, article 27 and article 28, shall be further regulated with a Government Regulation.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV LABEL DAN IKLAN PANGAN</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER IV FOOD LABEL AND ADVERTISEMENT</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam dan atau di kemasan pangan ;</p> <p>(2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai :</p>	<p style="text-align: center;">Article 30</p> <p>(1) Any person producing or importing into the territory of Indonesia food which is packed for sale is obligated to place a label on, within and or at the packing of the food ;</p> <p>(2) The label as referred to in paragraph (1) shall at least contain information concerning :</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>a. Nama produk ; b. Daftar bahan yang digunakan ; c. Berat bersih atau isi bersih ; d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; e. Keterangan tentang halal ; dan f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa</p> <p>(3) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, ditulis atau dicetak atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti oleh masyarakat ;</p> <p>(2) Keterangan pada label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin ;</p> <p>(3) Penggunaan istilah asing, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri.</p>	<p>a. The name of the product ; b. The list of materials used ; c. Net weight or net contents ; d. Name and address of the party which produces or imports the food into the territory of Indonesia ; e. Information on "halal" (legally permitted) and ; f. The expiry date, month and year</p> <p>(3) In addition to the information as referred to in paragraph (2), the Government may determine other information which must or is prohibited from being mentioned on food labels.</p> <p style="text-align: center;">Article 31</p> <p>(1) The information on the label as referred to in article 30 shall be distinctly and clearly written or printed or shown so that it can easily be understood by the community ;</p> <p>(2) The information on the label as referred to in paragraph (1) shall be written or printed in the Indonesian language, Arabic characters and Latin letters ;</p> <p>(3) The use of foreign terms, other than as referred to in paragraph (2), may be conducted as long as there is no equivalence, its equivalence cannot be created or it is used for the purpose of the food trade abroad.</p>
--	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Setiap orang dilarang mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 32</p> <p>Any person is prohibited from replacing, relabelling or exchanging the date, month and year of expiry of the food circulated.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Setiap label dan atau iklan tentang pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan ;</p> <p>(2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label atau iklan apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan ;</p> <p>(3) Pemerintah mengatur, mengawasi dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan yang dapat menyesatkan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 33</p> <p>(1) Every label and or advertisement concerning food which is sold must mention information concerning the food correctly and not misleading ;</p> <p>(2) Any person is prohibited from giving information or statement concerning food which is traded through, in, and or with a label or advertisement when the information or statement concerned is incorrect and is misleading ;</p> <p>(3) The government shall regulate, supervise and the measure which are needed, in order that an advertisement concerning food which is sold does not contain information which may be misleading.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut ;</p>	<p style="text-align: center;">Article 34</p> <p>(1) Any person declaring in on a label or in an advertisement that the food sold is in accordance with the requirements of a religion or belief, shall be responsible for the correctness of the statement based on said conditions of the religion or belief ;</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>(2) Label tentang pangan olahan tertentu yang diperdagangkan untuk bayi, anak berumur di bawah lima tahun dan ibu yang sedang hamil atau menyusui wajib memuat keterangan tentang peruntukkan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui mengenai dampak pangan terhadap kesehatan manusia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 34 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya ;</p> <p>(2) Setiap orang dilarang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia apabila pangan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.</p>	<p>(2) The label concerning certain processed food which is sold for babies, children below 5 years, and pregnant or nursing mothers must contain information concerning its designation, the manner of using or other required information regarding the impact of the food on human health.</p> <p style="text-align: center;">Article 35</p> <p>The provisions as referred to in article 30, article 31, article 33 and article 34, shall be further regulated with a Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER V</p> <p style="text-align: center;">THE IMPORT AND EXPORT OF FOOD INTO AND FROM THE TERRITORY OF INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">Article 36</p> <p>(1) Any food which is imported into the territory of Indonesia to be circulated must fulfill the provisions as referred to in this Act and its executive regulation ;</p> <p>(2) Any person is prohibited from importing food into the territory of Indonesia and or circulating them in the territory of Indonesia, food which is imported into the territory of Indonesia if said food does not fulfill the provisions as referred to in this Act and in the its executive regulations.</p>
--	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Terhadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;b. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada huruf a ; dan atauc. Pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu dan atau gizi sebelum peredarannya.	<p style="text-align: center;">Article 37</p> <p>On food which is imported into the territory of Indonesia as referred to in article 36, the Government may determine the requirement that :</p> <ol style="list-style-type: none">a. Said food has been tested or examined and is declared to have passed from the point of safety, quality and or nutrition by the authorized agency at the country of origin ;b. Said food is supported with a document showing the results of the testing and or examination, as referred to in letter a ; and orc. Said food shall first be tested and or examined in Indonesia from the point of safety, quality and or nutrition, before being circulated.
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan bertanggungjawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 38</p> <p>Any person importing food into the territory of Indonesia to be circulated shall be responsible for the safety, quality and or nutrition of said food.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label dan atau gizi pangan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 39</p> <p>The Government may determine a requirement, that food which is exported from the territory of Indonesia to be circulated be tested and or examined first from the point of safety, quality, label requirements and or nutrition of the food.</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.</p> <p>(2) Orang perseorangan yang kesehatannya terganggu atau ahli waris dari orang yang meninggal sebagai akibat langsung karena mengkonsumsi pangan olahan yang diedarkan berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;</p> <p>(3) Dalam hal terbukti bahwa pangan olahan yang diedarkan dan dikonsumsi tersebut mengandung bahan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan manusia atau bahan lain yang dilarang, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</p>	<p style="text-align: center;">Article 40</p> <p>The provisions as referred to in article 37, article 38 and article 39, shall further be regulated with a Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER VI RESPONSIBILITY OF THE FOOD INDUSTRY</p> <p style="text-align: center;">Article 41</p> <p>(1) A business entity which produces processed food to be circulated and or an individual person with in a business entity who is given the responsibility for the progress of the said business shall be responsible for the safety of the food which it produces, for the health of another person who consumes said food.</p> <p>(2) Individuals whose health is disturbed or the heir / meioses of a person who passed away as a direct consequence of consuming processed food which has been circulated is entitled to file a complaint for identification against the business entity or the individual with in the business entity as referred to in paragraph (1) ;</p> <p>(3) In case it is proven, that the relative processed food which is circulated and consumed, contains material which can harm and or endanger human health or other materials which are prohibited, then the business entity and or individual person within the business entity as referred to in paragraph (1) is</p>
--	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>wajib mengganti segala kerugian yang secara nyata ditimbulkan ;</p> <p>(4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaiannya, maka badan usaha dan atau orang perseorangan dalam badan usaha tidak wajib mengganti kerugian ;</p> <p>(5) Besarnya ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setinggi-tingginya sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap orang yang dirugikan kesehatannya atau kematian yang ditimbulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) tidak diketahui atau tidak berdomisili di Indonesia, ketentuan dalam pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) diberlakukan terhadap orang yang mengedarkan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Dalam hal kerugian yang ditimbulkan melibatkan jumlah kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit, Pemerintah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) ;</p>	<p>obligated to indemnify all losses which have actually been caused ;</p> <p>(4) Besides the provisions as referred to in paragraph (3) in case a business entity and or an individual person in a business entity can prove that said matter is not caused by its/his fault or negligence, the business entity and or individual person in a business entity is not obligated to indemnify ;</p> <p>(5) The amount of indemnification as referred to in paragraph (3), shall be maximum RP 500.000.000,00 (five hundred million rupiahs) for any person whose health is harmed, or the death caused.</p> <p style="text-align: center;">Article 42</p> <p>In case the domicile the party as referred to in article 41 paragraph (1) is not known or the party is not domiciled in Indonesia, then the provisions of Article 41 paragraph (3), and paragraph (5) shall be applied to the person(s), who has/have circulated and/or imported the food into the territory of Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Article 43</p> <p>(1) In case the loss which it has caused involves a large material loss and or considerable victims, the government is authorized to file a claim for indemnification as referred to in article 41 paragraph (2) ;</p>
---	--



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>(2) Gugatan ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan untuk kepentingan orang yang mengalami kerugian dan atau musibah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan pasal 43 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">BAB VII KETAHANAN PANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan ;</p> <p>(2) Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, pemerintah :</p> <p>a. Menyelenggarakan, membina dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mewujudkan cadangan pangan nasional ;</p>	<p>(2) The claim for indemnification as referred to in paragraph (1), shall be filed for the interests of the person, who has suffered a loss and or disaster.</p> <p style="text-align: center;">Article 44</p> <p>The provisions as referred to in article 42 and article 43, shall further be regulated with a Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER VII FOOD RESILIENCE</p> <p style="text-align: center;">Article 45</p> <p>(1) The government jointly with the community shall be responsible for the realization of the food resilience ;</p> <p>(2) In the framework of realizing the food resilience as referred to in paragraph (1), the government arranges the regulation, promotion, control and supervision on the sufficient food availability, both its quantity and quality, safety, nutritious, diversified equally distributed and with in reach of the purchasing power of the community.</p> <p style="text-align: center;">Article 46</p> <p>In the implementation of the provisions as referred to in article 45, the government shall :</p> <p>a. Carry out, develop and or coordinate all efforts or activities for the realization of the national food reserve ;</p>
---	--



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>b. Menyelenggarakan, mengatur dan atau mengkoodinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok ;</p> <p>c. Menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan panganekaragaman pangan ;</p> <p>d. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Cadangan pangan nasional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a, terdiri atas :</p> <p>a. Cadangan pangan pemerintah ;</p> <p>b. Cadangan pangan masyarakat .</p> <p>(2) Cadangan pangan pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan pangan, serta dengan mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan atau keadaan darurat ;</p> <p>(3) Dalam upaya mewujudkan cadangan pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah :</p> <p>a. Mengembangkan, membina dan atau membantu penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat dan Pemerintah di tingkat pedesaan,</p>	<p>b. Carry out, regulate and or coordinate all efforts and activities in the framework of the supply, procurement, and or distribution of certain food which is basic in nature ;</p> <p>c. Determine and implement the national food quality and food diversification policy ;</p> <p>d. Take the required measure to prevent and or overcome food shortage symptoms, emergency condition, and or speculation or manipulation in the procurement and circulation of food.</p> <p style="text-align: center;">Article 47</p> <p>(1) The national food reserves as referred to in article 46 letter a, shall consist of :</p> <p>a. Government food reserve ;</p> <p>b. Community food reserve.</p> <p>(2) The government food reserve shall be determined periodically, by taking into account the real level of demand for food of the community and the availability food of, and by anticipating the occurrence of food shortage and or an emergency situation ;</p> <p>(3) In the effort to realize the national food reserve as referred to in paragraph (1), the government shall :</p> <p>a. Develop, promote and or assist the execution of the community and government food reserves at rural, urban, provincial and national level;</p>
--	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>perkotaan, propinsi dan nasional ;</p> <p>b. Mengembangkan, menunjang dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peran koperasi dan swasta dalam mewujudkan cadangan pangan setempat dan atau nasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p>	<p>b. Develop, support and provide the widest possible opportunity for the role of the cooperatives and the private sector in realizing the local and or national food reserves.</p> <p style="text-align: center;">Article 48</p>
<p>Untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala harga pangan tertentu yang dapat merugikan ketahanan pangan, pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mengendalikan harga pangan tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p>	<p>In order to prevent and or overcome upheavals of certain foodstuff prices, which may harm the food resilience, the Government shall take the required measures in the framework of controlling the said food prices.</p> <p style="text-align: center;">Article 49</p>
<p>(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan yang meliputi upaya :</p> <p>a. Pengembangan sumber daya manusia di bidang pangan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, terutama usaha kecil ;</p> <p>b. Untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kemampuan usaha kecil, penyuluhan di bidang pangan, serta penganekaragaman pangan ;</p> <p>c. Untuk mendorong dan mengarahkan peran serta asosiasi dan organisasi profesi di bidang pangan ;</p> <p>d. Untuk mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan atau pengembangan teknologi di bidang pangan ;</p>	<p>(1) In Government shall carry out promotion covering the efforts to :</p> <p>a. Develop the human resources in the field of food through education and training activities, especially the small scale businesses ;</p> <p>b. Stimulate and increase the participation of the community in the human resources development activities, improving the capability of the small-scale businesses, extentions in the field of food and diversification of food ;</p> <p>c. Stimulate and direct the participation of professional associations and organizations in the field of food ;</p> <p>d. Stimulate and support the activities of technological research and or development in the field of food ;</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>e. Penyebarluasan pengetahuan dan penyuluhan di bidang pangan ;</p> <p>f. Pembinaan kerja sama internasional di bidang pangan, sesuai dengan kepentingan nasional ;</p> <p>g. Untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan penganekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat serta pemantapan mutu pangan tradisional.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.</p>	<p>e. Disseminate the knowledge and extensions in the field of food ;</p> <p>f. Promote the international cooperation in the field of food in accordance with the national interest;</p> <p>g. Stimulate and increase the activities of food diversification of food consumed by the community, and the stabilization of the traditional food quality.</p> <p>(2) The provisions as referred to in paragraph (1) shall be further regulated by the Government .</p> <p style="text-align: center;">Article 50</p> <p>The provisions as referred to in article 45, 46, 47, 48 and article 49, shall be further regulated with a Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER VIII PARTICIPATION OF THE COMMUNITY</p> <p style="text-align: center;">Article 51</p> <p>The community has the opportunity to participate as extensively as possible in realizing the protection of individuals consuming food, in accordance with the provisions of this Act and its executive regulations as well as the other legislative regulations in force.</p>
--	--



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan.</p>	<p style="text-align: center;">Article 52</p> <p>In the framework of improving and upgrading of the food system, the community may submit problems, inputs and or the solution method on matters in the field of food.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">CHAPTER IX SUPERVISION</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Untuk mengawasi pemenuhan ketentuan Undang-undang ini, pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan ;</p> <p>(2) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang :</p> <p>a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau perdagangan pangan ;</p> <p>b. Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan</p>	<p style="text-align: center;">Article 53</p> <p>(1) To supervise the adherence to the provisions of this Act, the Government is authorized to carry out an investigation in case there is a suspicious that a legal violation has taken place in the field of food ;</p> <p>(2) In performing the function of examination as referred to in paragraph (1), the Government is authorized to :</p> <p>a. Enter any place, suspected to be used for the activities or process production of, storage, transportation and trading of food, to examine, investigate and take food samples, and anything suspected to be used in activities or production, storage, transportation and or trading of food ;</p> <p>b. Cease, examine and prevent any transportation means suspected or reasonable to be suspected to be used in the transportation of food, and take examine food samples ;</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>memeriksa contoh pangan ;</p> <p>c. Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan ;</p> <p>d. Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau perdagangan pangan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut ;</p> <p>e. Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.</p> <p>(3) Pejabat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan surat perintah ;</p> <p>(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pemerintah berwenang</p>	<p>c. To open and to examine each food package ;</p> <p>d. To examine any book, document of other records which is suspected to contain information regarding the activities of production, storage, transportation and or trade of food ;</p> <p>e. To order that the Business License or other similar documents be shown.</p> <p>(3) The Investigating Official shall be provided with a warrant to carry out the examination as referred to in paragraph (2) ;</p> <p>(4) In case based on the results of the examination as referred to in paragraph (2) it is reasonable to be suspected that it constitutes a criminal Act in the field food, then an investigation by an investigator shall immediately be carried out based on the legislative regulations in force ;</p> <p>(5) The provisions as referred to in paragraph (1), (2) and (3) shall be further stipulated by a Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;">Article 54</p> <p>(1) In the implementation of the supervisory function as referred to in article 53, the Government has the</p>
---	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang ini ;</p> <p>(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Peringatan secara tertulis ;b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat resiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia;c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia ;d. Penghentian produksi untuk sementara waktu ;e. Pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atauf. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Barangsiapa dengan sengaja :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan	<p>authority to take administrative measures on the violations of the provisions of this Act ;</p> <p>(2) The administrative sanction as referred to in paragraph (1), may be in the form of :</p> <ul style="list-style-type: none">a. A written warning ;b. The prohibition to circulate temporarily and or to order the withdrawal of the food product from circulation when there is a risk of the food being contaminated or the food is no longer safe for human being ;c. The destruction of the food if it is proven to be dangerous to the health and life of humans ;d. Temporary discontinuation of production ;e. The imposition of a fine of maximum RP 50.000.000,00 (fifty million rupiahs) ;f. The revocation of the production licence or the business license. <p>(6) The provisions as referred to in paragraph (1) and (2) shall be further regulated with a Government Regulation.</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER X CRIMINAL PROVISIONS</p> <p style="text-align: center;">Article 55</p> <p>Whomever intentionally :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Carry out the activities or process of production, storage, transportation and
--	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ;</p>	<p>or circulation of food in situation not fulfilling the sanitation requirements as referred to in article 8;</p>
<p>b. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ;</p>	<p>b. Uses prohibited materials as food additives or uses food additives in a way exceeding the determined maximum threshold limit as referred to in article 10 paragraph (1) ;</p>
<p>c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ;</p>	<p>c. Uses prohibited materials as packing of food and or any material capable of releasing a pollutant harmful or endangering the healths of humans as referred to in article 16 paragraph (1) ;</p>
<p>d. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e ;</p>	<p>d. Circulates food prohibited for circulation as referred to in article 21 letter a, b, c, d, or e ;</p>
<p>e. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a ;</p>	<p>e. Trades in food not fulfilling the obligated quality standard as referred to in article 26 letter a ;</p>
<p>f. Memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b ;</p>	<p>f. Trades in food of which the quality is different or not the same as the warranted quality of the food as referred to in article 26 letter a ;</p>
<p>g. Memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c ;</p>	<p>g. Trades in food which does not fulfill the food quality certification requirements as referred to in article 26 letter c ;</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>h. Mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa pangan yang diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32;</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Barangsiapa karena kelalaiannya :</p> <p>a. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ;</p> <p>b. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ;</p> <p>c. Menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ;</p> <p>d. Mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf</p>	<p>h. Replace, re-label or exchange the date, month and year of expiry of the food circulated, as referred to in article 32 ;</p> <p>Shall be sentenced with imprisonment of maximum 5 (five) years and or a fine of maximally RP 600.000.000,00 (six hundred million rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Article 56</p> <p>Whomever because of his / her negligence :</p> <p>a. Carries out activities or process of production, storage, transportation, and or circulation of food in a condition which does not meet the sanitation requirements as referred to in article 8 ;</p> <p>b. Uses materials prohibited to be used as food additive or uses food additive materials exceeding the determined maximum threshold limit as referred to in article 10 paragraph (1) ;</p> <p>c. Uses materials prohibited to be used as food packing and or any materials which may release a pollutant which is harmful or endangering the health of humans as referred to in article 16 paragraph (1) ;</p> <p>d. circulates food of which the circulation is prohibited, as referred to in article 21 letter a, b, c, or e ;</p>
---	--



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>b, huruf c, huruf d, atau huruf e ;</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak RP 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Ancaman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta pasal 56 ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Barangsiapa :</p> <p>a. Menggunakan suatu bahan sebagai bahan tambahan pangan dan mengedarkan pangan tersebut secara bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 11 ;</p> <p>b. Mengedarkan pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan dan atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika, tanpa lebih dahulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ;</p> <p>c. Menggunakan iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ;</p>	<p>shall be sentenced with imprisonment of maximum 1 (one) year and or a fine of maximum RP 120.000.000,00 (one hundred and twenty million rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Article 57</p> <p>The criminal charge of punishment on the violation as referred to in article 55 letters a, b, c and d and article 56 shall be increased with one fourth if it has caused harm to the health of humnas or increased with one third if it has caused death.</p> <p style="text-align: center;">Article 58</p> <p>Whomever :</p> <p>a. uses a material as food additive and circulates said food in contradiction to the provisions in article 11 ;</p> <p>b. circulates food which is produced or uses raw materials, food additives, and or other auxiliary material in the production activities or process of food which if produced from a genetic engineering process, without first having the safety of the food examined, as referred to in article 13 paragraph (1);</p> <p>c. usus irradiation in the food production activities or process without permission as referred to in article 14 paragraph (1);</p>
--	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>d. Menggunakan suatu bahan sebagai kemasan pangan untuk diedarkan secara bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 17 ;</p>	<p>d. uses material as package of food to be circulated in contradiction to the provisions in article 17 ;</p>
<p>e. Membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan memperdagangkannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) ;</p>	<p>e. opens the final packing of food to be repacked and sell it as referred to in article 18 paragraph (1) ;</p>
<p>f. Mengedarkan pangan tertentu yang diperdagangkan tanpa lebih dahulu diuji secara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) ;</p>	<p>f. circulates certain food which is sold without first having it tested in the laboratory, as preferred to in article 20 paragraph (2) ;</p>
<p>g. Memproduksi pangan tanpa memenuhi persyaratan tentang gizi pangan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) ;</p>	<p>g. produces food without fulfilling the requirements on food nutrition as referred to in article 27 paragraph (4) ;</p>
<p>h. Memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau pasal 31;</p>	<p>h. produces or imports into the territory of Indonesia food which is packed to be sold without putting a label as referred to in article 30 or article 31 ;</p>
<p>i. Memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau menyesatkan mengenai pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) ;</p>	<p>i. provides incorrect and or misleading information or statement concerning the food sold through, in and or with a label and or advertisement as referred to in article 33 paragraph (2) ;</p>
<p>j. Memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>j. provides incorrect statement or information in an advertisement or label that the food sold is in accordance with the requirements of a certain religion or belief, as referred to in article 34 paragraph (1) ;</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>pasal 34 ayat (1) ;</p> <p>k. Memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan atau mengedarkan di dalam wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) ;</p> <p>l. Menghambat kelancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ;</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Barangsiapa :</p> <p>a. Tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang memenuhi persyaratan sanitasi, keamanan dan atau keselamatan manusia atau tidak menyelenggarakan program pemantauan sanitasi secara berkala, atau tidak menyelenggarakan pengawasan atas pemenuhan persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ;</p> <p>b. Tidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ;</p> <p>c. Tidak melaksanakan tata cara pengemasan pangan yang ditetapkan,</p>	<p>k. imports food into the territory of Indonesian and or circulates within the territory of Indonesia food which does not meet the provisions of this Act and into executive regulation, as referred to in article 36 paragraph (2) ;</p> <p>l. hampers the smooth process of examination as referred to in article 53 ;</p> <p>shall be sentenced with imprisonment of maximum 3 (three) years and or a fine of maximum RP 360.000.000,00 (three hundred and sixty million rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Article 59</p> <p>Whomever :</p> <p>a. does not carry out production activities or process, storage, transportation and or circulation of food which fulfill meeting the requirements of sanitation, security and or safety of humans or does not carry out a periodic sanitation monitoring program or does not carry out supervision on the fulfillment of the sanitation requirements as referred to in article 6 ;</p> <p>b. does not fulfill the sanitation requirements as referred to in article 7 ;</p> <p>c. does not carry out the determined food packaging procedure as referred to in</p>
---	--



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) ;</p> <p>d. Tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu yang ditetapkan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) ;</p> <p>e. Tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) ;</p> <p>Meskipun telah diperingatkan secara tertulis oleh pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">BAB XI PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang pangan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;</p> <p>(2) Pemerintah dapat menugaskan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas pembantuan di bidang pangan ;</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>	<p>article 16 paragraph (3) ;</p> <p>d. does not carry out the quality assurance system determined in the production activities or process of food to be sold, as referred to in article 20 paragraph (1);</p> <p>e. does not mention the information which must be mentioned on the label, as referred to in article 34 paragraph (2) ;</p> <p>although already warned in writing by the government, shall be sentenced with imprisonment for a maximum of 4 (four) years and or a fine of maximum RP 480.000.000,00 (four hundred and eighty million rupiah).</p> <p style="text-align: center;">CHAPTER XI SUBMISSION OF AFFAIRS AND THE TASKS OF ASSISTANCE</p> <p style="text-align: center;">Article 60</p> <p>(1) The Government may submit part of the affairs in the field of food to the Regional Administration, in accordance with the legislative regulations in force;</p> <p>(2) The Government may assign the Regional Administration to carry out the task of assistance in the field of food ;</p> <p>(3) The provisions as referred to in paragraph shall be further determined with a by Government Regulation.</p>
---	---



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p>CHAPTER XII OTHER PROVISIONS</p>
<p>Pasal 61</p> <p>(1) Dalam hal terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangat mendesak, pemerintah dapat mengesampingkan untuk sementara waktu ketentuan Undang-undang ini tentang persyaratan keamanan pangan, label, mutu dan atau persyaratan gizi pangan ;</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan terjaminnya kesehatan masyarakat.</p>	<p>Article 61</p> <p>(1) In the event of a very urgent food shortage condition, the Government may temporarily put aside the provisions of this Act on the conditions of food safety, label, quality and or food nutrition requirements ;</p> <p>(2) The provisions as referred to in paragraph (1) shall be implemented white paying attention to the safety and the safeguarding of the community's health.</p>
<p>Pasal 62</p> <p>Bilamana dipandang perlu, pemerintah dapat menunjuk instansi untuk mengkoordinasikan terlaksananya undang-undang ini.</p>	<p>Article 62</p> <p>When considered necessary, the Government may designate an agency to coordinate the implementation of this Act.</p>
<p>Pasal 63</p> <p>Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya tidak berlaku bagi pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh kalangan rumah tangga.</p>	<p>Article 63</p> <p>This Act and the its executive regulations does not apply to food produced and consumed by household circles.</p>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

<p>BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 64</p> <p>Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan tentang pangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.</p> <p>BAB XIV KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 65</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Disahkan di Jakarta Pada tanggal 4 Nopember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>S O E H A R T O</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Nopember 1996 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MOERDIONO *** fat ***</p>	<p>CHAPTER XIII TRANSITIONAL PROVISION</p> <p>Article 64</p> <p>At the time this Act comes into force, all legislative regulations on food which are already in existence are declared to remain in force as long as they are not in contradiction with this Act.</p> <p>CHAPTER XIV CONCLUDING PROVISIONS</p> <p>Article 65</p> <p>This Act shall come into force as of the date of promulgation.</p> <p>In order that everyone shall take cognizance, it is ordered to promulgate this Act by its placement in the State Gazette of The Republic Indonesia.</p> <p>Legalized in Jakarta On November 4, 1996 PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>S O E H A R T O</p> <p>Promulgated in Jakarta On November 4, 1996 THE STATE MINISTER STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>MOERDIONO *** fat ***</p>
---	--